

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023, dengan total 94 perusahaan. Pemilihan sektor properti dan *real estate* didasarkan pada karakteristik unik industri ini yang memerlukan investasi modal besar, sensitivitas tinggi terhadap kondisi ekonomi makro, serta peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Periode 2021-2023 dipilih untuk menggambarkan kondisi industri properti pasca pandemi COVID-19, di mana sektor ini mengalami dinamika signifikan dalam kinerja keuangan dan operasional akibat perubahan pola kerja, kebutuhan hunian, dan preferensi konsumen.

Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan perusahaan melalui website resmi BEI (www.idx.co.id). Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan kualitas data dan relevansi analisis. Dari 94 perusahaan populasi, terdapat 12 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian, sehingga memungkinkan fokus pada perusahaan dengan data lengkap dan konsisten yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data berikut ini diperoleh melalui pengamatan laporan keuangan tahunan dengan rincian :

Tabel 4. 1 Deskripsi Objek Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan yang terdaftar secara konsisten di sektor properti dan <i>real estate</i> selama periode 2021-2023 di BEI.	94
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap dan telah diaudit di BEI selama periode penelitian.	(19)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki informasi terkait variabel penelitian (ETR, ROA, <i>corporate governance</i> , transaksi afiliasi, ukuran perusahaan).	(13)
4.	Perusahaan yang mengalami outlier ekstrem dalam laporan keuangan, seperti laba negatif yang menyebabkan nilai ETR menjadi tidak bermakna.	(50)
Jumlah Sampel Perusahaan yang Digunakan		12
Tahun Penelitian		3
Jumlah Sampel Data yang Digunakan		36

Sumber : Data diolah penulis (2025)

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Standar deviasi mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Semakin besar standar deviasi, semakin luas variasi data. Penelitian ini menggunakan 36 data observasi ($n = 36$) yang terdiri dari beberapa variabel utama, yaitu profitabilitas (ROA), *corporate governance* (proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional), transaksi afiliasi (RPT *Ratio*), penghindaran pajak (ETR), dan ukuran perusahaan.

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas (ROA)	36	3126.00	254871.00	58346.1944	60373.83217
<i>Corporate Governancce</i> (Proporsi Komisaris Independen)	36	2500000.00	500000.00	382870.1667	77407.13011
<i>Corporate Governance</i> (Kepemilikan Institusional)	36	116906.00	969998.00	716369.7500	233953.8975
Transaksi Afiliasi (RPT Ratio)	36	2015.00	307712.00	54090.9444	83451.87852
Penghindaran Pajak (ETR)	36	3241.00	277474.00	74496.9722	78022.56716
Ukuran Perusahaan	36	24218475.00	31118726.00	28904685.19	1777299.854
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data yang diolah di SPSS26 2025

Tabel 4.2 menampilkan hasil uji statistik deskriptif untuk variabel yang ada pada penelitian ini. Variabel profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA memiliki nilai minimum sebesar 0,003126 dan maksimum sebesar 0,254871, dengan nilai rata-rata 0,058346 dan standar deviasi 0,060373. Nilai rata-rata yang relatif rendah menunjukkan tingkat laba atas aset yang tidak terlalu tinggi secara keseluruhan. Standar deviasi yang mendekati nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi data cukup besar, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antar perusahaan dalam hal kemampuan menghasilkan keuntungan dari asetnya.

Proporsi komisaris independen menunjukkan rata-rata sebesar 0,38287 dengan standar deviasi 0,077407. Dapat disimpulkan bahwa variasi data tergolong sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki proporsi komisaris independen yang berada pada kisaran yang tidak terlalu jauh dari rata-rata, meskipun tetap ada sedikit perbedaan antar perusahaan.

Pada variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum 0,116906, maksimum 0,969998, dengan rata-rata 0,71637 dan standar deviasi 0,233954. Nilai rata-rata yang tinggi mengindikasikan dominasi kepemilikan institusional dalam struktur saham perusahaan. Sementara itu, standar deviasi yang besar menunjukkan tingkat variasi yang tinggi. Hal ini berarti bahwa sebagian perusahaan memiliki tingkat kepemilikan institusional yang sangat tinggi, sedangkan lainnya jauh lebih rendah.

Transaksi afiliasi memiliki nilai minimum 0,002015 dan maksimum 0,307712, dengan rata-rata 0,054091 serta standar deviasi 0,083451. Rata-rata yang kecil namun diiringi standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data sangat bervariasi. Ini menandakan bahwa sebagian besar perusahaan melakukan transaksi afiliasi dalam jumlah kecil, namun terdapat beberapa perusahaan dengan nilai transaksi yang sangat besar, sehingga menciptakan penyebaran data yang luas.

Nilai ETR memiliki minimum 0,003241, maksimum 0,277474, rata-rata 0,074497, dan standar deviasi 0,078023. Rata-rata yang rendah mencerminkan bahwa beban pajak efektif yang dibayar perusahaan umumnya kecil. Standar deviasi yang tinggi dibandingkan rata-rata menunjukkan variasi yang cukup besar,

yang berarti ada perusahaan yang membayar pajak secara proporsional, tetapi ada juga yang menghindari pajak secara signifikan.

Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum 24,218475, maksimum 31,118726, dengan rata-rata 28,904685 dan standar deviasi sebesar 1,777299. Rata-rata ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki ukuran yang cukup besar dan relatif seimbang. Rentang antara nilai minimum dan maksimum yang tidak terlalu jauh, disertai dengan standar deviasi yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan rata-ratanya, menunjukkan bahwa variasi data tergolong rendah hingga sedang. Dengan kata lain, ukuran perusahaan dalam sampel cenderung homogen, tanpa adanya perbedaan yang ekstrem antarperusahaan.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.066	36	.200	.965	36	.298

Sumber : Data yang diolah di SPSS26 2025

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dari model regresi berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Shapiro-Wilk* karena jumlah sampel yang digunakan sebanyak 36 ($n < 50$). Berdasarkan hasil uji *Shapiro-Wilk*, diperoleh nilai

signifikansi sebesar 0,298 yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$), maka syarat normalitas data telah terpenuhi. Hal ini berarti model regresi layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut, seperti uji regresi linear berganda dan analisis moderasi (MRA).

4.2.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	Profitabilitas (ROA)	.404	2.476
	<i>Corporate Governance</i> (Proporsi Komisaris Independen)	.849	1.178
	<i>Corporate Governance</i> (Kepemilikan Institusional)	.855	1.170
	Transaksi Afiliasi (RPT Ratio)	.359	2.785
	Ukuran Perusahaan	.694	1.440

Sumber : Data yang diolah di SPSS26 2025

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi yang dapat mengganggu keakuratan estimasi koefisien regresi. Indikator yang digunakan dalam uji ini adalah nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Berdasarkan hasil *output* regresi, seluruh variabel dalam model menunjukkan nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10.

Secara rinci, variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,404 dan VIF sebesar 2,476; proporsi komisaris independen memiliki *tolerance*

0,849 dan VIF 1,178; kepemilikan institusional memiliki *tolerance* 0,855 dan VIF 1,170; transaksi afiliasi (RPT Ratio) memiliki *tolerance* 0,359 dan VIF 2,785; serta ukuran perusahaan memiliki *tolerance* 0,694 dan VIF 1,440.

Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model regresi ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terdapat hubungan linear yang kuat yang dapat mengganggu validitas model. Oleh karena itu, asumsi tidak adanya multikolinearitas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.2.2.3 Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.637 ^a	.406	.307	64956.24298	2.105

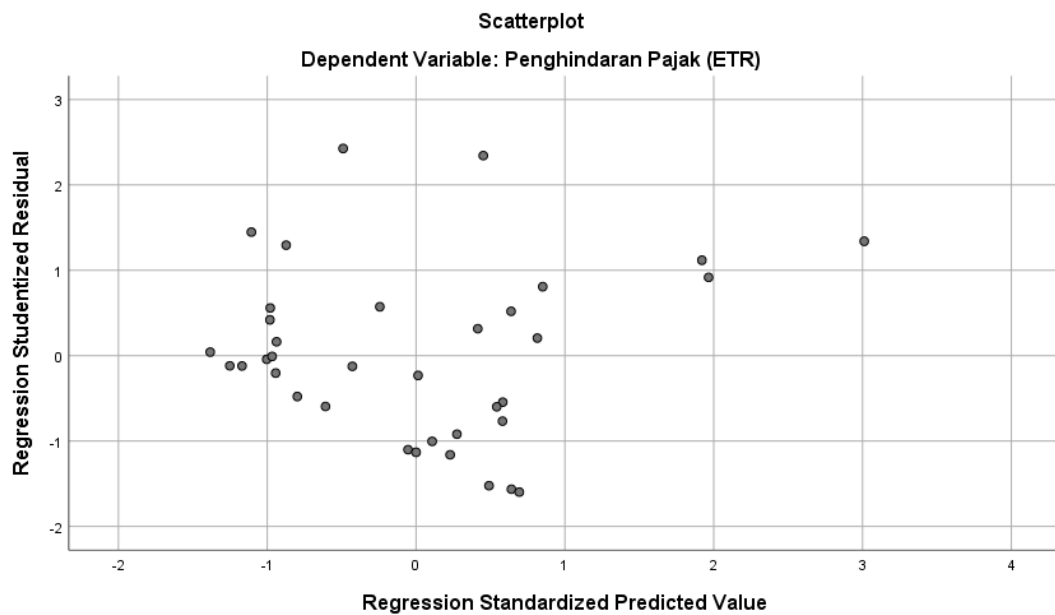
Sumber : Data yang diolah di SPSS26 2025

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara residual dalam model regresi. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai Durbin-Watson (DW), yang hasilnya kemudian dibandingkan dengan nilai kritis batas bawah (dL) dan batas atas (dU) dari tabel Durbin-Watson (Ghozali, 2021). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,105. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 36, dengan jumlah variabel independen sebanyak 5. Berdasarkan tabel Durbin-Watson pada tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai dL = 1,175 dan Du = 1,799. Dalam perhitungan ini, nilai $4 - dU = 2,201$. Karena nilai DW berada pada rentang $dU <$

$DW < 4 - Du$ atau $1,799 < 2,105 < 2,201$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif dalam model regresi yang digunakan.

4.2.2.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data yang diolah di SPSS26 2025

Berdasarkan gambar *scatterplot* di atas, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis horizontal nol, tanpa membentuk pola tertentu seperti menyempit (kerucut) atau melebar secara sistematis. Penyebaran yang acak ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, asumsi klasik mengenai homokedastisitas telah terpenuhi, yang berarti variansi dari residual model bersifat konstan pada semua tingkat prediksi dan model layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

4.2.3 Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 6 Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-62110.511	79320.342		-.783	.440
	Profitabilitas (ROA)	-.512	.308	-.396	-1.662	.107
	<i>Corporate Governance</i> (Proporsi Komisaris Independen)	.380	.161	.377	2.353	.025
	<i>Corporate Governance</i> (Kepemilikan Institusional)	.001	.054	.003	.018	.985
	Transaksi Afiliasi (RPT Ratio)	.377	.221	.403	1.708	.098

Sumber : Data yang diolah di SPSS26 2025

$$\text{ETR} = -62110,511 - 0,512 \text{ ROA} + 0,38 \text{ Proporsi Komisaris Independen} + 0,001$$

$$\text{Kepemilikan Institusional} + 0,377 \text{ RPT Ratio} + \varepsilon$$

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu Penghindaran Pajak (ETR). Profitabilitas (ROA) memiliki koefisien regresi sebesar -0,512 dengan nilai signifikansi 0,107. Hal ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin rendah penghindaran pajak. Namun karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$), maka pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.

Corporate governance (proporsi komisaris independen) memiliki koefisien regresi sebesar 0,380 dengan nilai signifikansi 0,025. Ini menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak ($p < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka tingkat penghindaran pajak juga cenderung meningkat. Hasil ini bisa jadi menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum cukup efektif dalam menekan praktik penghindaran pajak.

Corporate governance (kepemilikan institusional) memiliki koefisien sebesar 0,001 dengan signifikansi 0,985. Ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak ($p > 0,05$). Transaksi afiliasi (RPT Ratio) memiliki koefisien regresi sebesar 0,377 dan nilai signifikansi 0,098. Meskipun arah pengaruh positif di mana semakin besar transaksi afiliasi semakin tinggi penghindaran pajak, pengaruhnya tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikansi masih di atas 0,05 ($p > 0,05$).

Dari keempat variabel independen yang diuji, hanya *corporate governance* (proporsi komisaris independen) yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel lain seperti ROA, kepemilikan institusional, dan transaksi afiliasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model ini. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tata kelola tertentu bisa berperan penting, sementara yang lain belum tentu berfungsi efektif dalam konteks pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak.

4.2.4 Moderated Regressions Analysis (MRA)

Tabel 4. 7 Hasil *Moderated Regressions Analysis* (MRA)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-877482.770	1196280.486		-.734	.470
	Profitabilitas (ROA)	15.143	5.501	11.718	-1.662	.107
	<i>Corporate Governance</i> (Proporsi Komisaris Independen)	8.091	3.362	8.027	2.353	.025
	<i>Corporate Governance</i> (Kepemilikan Institusional)	-4.413	1.984	13.231	.018	.985
	Transaksi Afiliasi (RPT <i>Ratio</i>)	1.101	2.159	1.177	1.708	.098
	Ukuran Perusahaan	.034	.042	.770	.803	.429
	Profitabilitas*Ukuran Perusahaan	-5.603E-7	.000	12.167	-2.816	.009
	Proporsi Komisaris Independen*Ukuran Perusahaan	-2.696E-7	.000	-7.504	-2.360	.026
	Kepemilikan Institusional*Ukuran Perusahaan	1.467E-7	.000	12.679	2.194	.037
	Transaksi Afiliasi*Ukuran Perusahaan	-1.584E-8	.000	-.464	-.198	.845

Sumber : Data yang diolah di SPSS26 2025

$$\begin{aligned} \text{ETR} = & -877482,770 + 15,143 \text{ ROA} + 8,091 \text{ Proporsi Komisaris Independen} - \\ & 4,413 \text{ Kepemilikan Institusional} + 1,101 \text{ RPT Ratio} - 5,603\text{E-}7 \text{ ROA*Ukuran} \\ & \text{Perusahaan} - 2,696\text{E-}7 \text{ Proporsi Komisaris Independen*Ukuran Perusahaan} + \\ & 1,467\text{E-}7 \text{ Kepemilikan Institusional*Ukuran Perusahaan} - 1,584\text{E-}8 \text{ RPT} \\ & \text{Ratio*Ukuran Perusahaan} + \varepsilon \end{aligned}$$

Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) dilakukan untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara variabel independen (profitabilitas, *corporate governance*, dan transaksi afiliasi) terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Dalam analisis ini, variabel interaksi (produk dari variabel independen dan ukuran perusahaan) ditambahkan ke dalam model regresi untuk melihat pengaruh moderasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel interaksi profitabilitas*ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien -5,603E-7 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009. Karena nilai signifikansi <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Tanda negatif dari koefisien menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak cenderung melemah.

Interaksi antara proporsi komisaris independen*ukuran perusahaan juga menunjukkan hasil signifikan, dengan koefisien -2,696E-7 dan nilai signifikansi 0,026. Ini berarti bahwa ukuran perusahaan juga memoderasi hubungan antara proporsi komisaris independen dan penghindaran pajak, dengan arah pengaruh

negatif. Artinya pada perusahaan yang lebih besar, keberadaan komisaris independen cenderung kurang efektif dan menekan praktik penghindaran pajak.

Berbeda halnya dengan interaksi antara kepemilikan institusional*ukuran perusahaan, yang meskipun menunjukkan signifikansi sebesar 0,037 ($<0,05$), namun memiliki koefisien positif sebesar $1,467E-7$. Ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan juga memoderasi secara signifikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, dengan kecenderungan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak meningkat pada perusahaan yang lebih besar. Sementara itu, interaksi transaksi afiliasi*ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,845, yang berarti tidak signifikan. Dengan demikian, ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara transaksi afiliasi dan penghindaran pajak.

4.2.5 Uji Hipotesis

4.2.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.526 ^a	.277	.183	70516.159

Sumber : Data yang diolah di SPSS26 2025

Uji koefisien determinasi (*R Square*) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan *output* pada tabel di atas, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,277 yang berarti bahwa 27,7% variasi penghindaran pajak (ETR) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, yaitu transaksi afiliasi, proporsi

komisaris independen, kepemilikan institusional, dan profitabilitas. Sementara itu, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,183 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan, model hanya mampu menjelaskan 18,3% variasi penghindaran pajak secara efektif. Nilai *Adjusted R Square*) digunakan untuk memberikan estimasi yang lebih akurat terhadap kemampuan prediktif model, terutama ketika jumlah variabel independen lebih dari satu.

4.2.5.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

Tabel 4. 9 Hasil Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.891E+10	4	1.473E+10	2.962	.035 ^b
	Residual	1.541E+11	31	4972528703		
	Total	2.131E+11	35			

Sumber : Data yang diolah di SPSS26 2025

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang diuji adalah profitabilitas (ROA), transaksi afiliasi (RPT Ratio), proporsi komisaris independen, dan kepemilikan institusional, dengan variabel dependen penghindaran pajak (ETR). Berdasarkan tabel ANOVA di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 2,962 dengan nilai signifikansi sebesar 0,035. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik. Artinya, keempat variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, model regresi dalam

penelitian ini layak digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel independen dan penghindaran pajak, karena secara keseluruhan model memiliki kemampuan penjelas yang bermakna secara statistik.

4.2.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Tabel 4. 10 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-877482.770	1196280.486		-.734	.470
	Profitabilitas (ROA)	15.143	5.501	11.718	-1.662	.107
	<i>Corporate Governance</i> (Proporsi Komisaris Independen)	8.091	3.362	8.027	2.353	.025
	<i>Corporate Governance</i> (Kepemilikan Institusional)	-4.413	1.984	13.231	.018	.985
	Transaksi Afiliasi (RPT Ratio)	1.101	2.159	1.177	1.708	.098
	Ukuran Perusahaan	.034	.042	.770	.803	.429
	Profitabilitas*Ukuran Perusahaan	-5.603E-7	.000	12.167	-2.816	.009
	Proporsi Komisaris Independen*Ukuran Perusahaan	-2.696E-7	.000	-7.504	-2.360	.026
	Kepemilikan Institusional*Ukuran Perusahaan	1.467E-7	.000	12.679	2.194	.037
	Transaksi Afiliasi*Ukuran Perusahaan	-1.584E-8	.000	-.464	-.198	.845

Sumber : Data yang diolah di SPSS26 2025

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dalam hal ini penghindaran pajak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dari setiap variabel terhadap batas signifikansi 0,05. Jika nilai Sig. $< 0,05$, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji T, diketahui bahwa profitabilitas (ROA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,107, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan perusahaan tidak secara langsung memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya, corporate governance yang diukur dari proporsi komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,025, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar proporsi komisaris independen, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, meskipun arah hubungan ini dapat berbeda tergantung pada konteks peran pengawasan dewan komisaris.

Berbeda halnya dengan kepemilikan institusional, yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,985. Nilai ini jauh di atas 0,05, yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian pula, transaksi afiliasi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,098, sehingga meskipun menunjukkan arah pengaruh positif, secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan.

Sementara itu, untuk variabel moderasi, yaitu ukuran perusahaan, memiliki nilai signifikansi 0,429, yang berarti tidak berpengaruh langsung terhadap penghindaran pajak. Namun, tiga interaksi antara variabel independen dengan ukuran perusahaan justru menunjukkan pengaruh yang signifikan. Interaksi antara profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,009, interaksi antara proporsi komisaris independen dan ukuran perusahaan sebesar 0,026, dan interaksi antara kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan sebesar 0,037. Ketiganya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan. Sedangkan interaksi antara transaksi afiliasi dan ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,845, sehingga tidak signifikan secara statistik.

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) memiliki koefisien sebesar 15,143 dengan nilai signifikansi 0,107 ($> 0,05$), yang mengindikasikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien positif menunjukkan arah hubungan positif terhadap ETR, artinya setiap peningkatan pada profitabilitas cenderung menurunkan tingkat praktik penghindaran pajak, namun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik.

Meskipun secara teori perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki lebih banyak insentif dan sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif, dalam praktiknya hal ini tidak selalu terjadi karena adanya faktor lain

seperti tekanan regulasi, kepatuhan fiskal, serta nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (Fergytaningsih & Wasif, 2025). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi lebih memilih untuk mematuhi peraturan perpajakan guna menghindari risiko hukum, biaya reputasi, dan konsekuensi jangka panjang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, profitabilitas bukanlah pendorong utama dalam praktik penghindaran pajak, dan perusahaan mungkin lebih mempertimbangkan nilai etika, transparansi, dan kepatuhan sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan (Fahmi et al., 2025). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa penghindaran pajak bukan semata-mata dipengaruhi oleh tingkat keuntungan perusahaan, melainkan juga sangat tergantung pada faktor-faktor lain seperti tekanan eksternal dari regulator, internalisasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, serta kesadaran manajemen akan pentingnya kepatuhan fiskal. Oleh karena itu, meskipun terdapat kecenderungan arah hubungan positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak, hubungan tersebut belum dapat disimpulkan secara pasti karena tidak terbukti secara statistik dalam konteks penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam perspektif teori agensi, temuan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak mengindikasikan adanya konflik kepentingan yang kompleks antara prinsipal dan agen. Meskipun arah hubungan positif menunjukkan bahwa manajemen memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak ketika profitabilitas tinggi guna memaksimalkan laba dan kompensasi berbasis kinerja, hasil yang tidak signifikan mencerminkan bahwa manajemen menghadapi *trade-off* antara

kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dari pemegang saham dan sistem tata kelola perusahaan yang baik mungkin telah berperan dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen, sehingga keputusan terkait strategi pajak perusahaan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti risiko reputasi, biaya kepatuhan, struktur kepemilikan, atau kualitas audit daripada semata-mata tingkat profitabilitas.

Keterkaitan dengan penelitian terdahulu juga memperkuat temuan ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha & Rachmat, 2024) menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat keuntungan perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak dapat terjadi karena kelemahan dalam tiga komponen utama yaitu struktur hukum di bidang perpajakan, peraturan perundang-undangan, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2022) menjelaskan bahwa semakin tinggi profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal dengan baik untuk menghasilkan laba optimal. Namun profitabilitas yang tinggi tidak secara otomatis mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Konsistensi hasil ini memperkuat validitas temuan bahwa faktor profitabilitas bukan merupakan determinan utama dalam keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

4.3.2 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis, terdapat dua variabel *corporate governance* yang diuji. Pertama, proporsi komisaris independen memiliki koefisien sebesar 8,091 dengan nilai signifikansi 0,025 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap ETR. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Kedua, kepemilikan institusional menunjukkan koefisien sebesar -4,413 dengan nilai signifikansi 0,985 ($> 0,05$), yang berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. nilai koefisien negatif mengindikasikan bahwa peningkatan kepemilikan institusional cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak, meskipun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa proporsi komisaris independen memengaruhi penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen yang lebih besar dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap praktik manajemen, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Komisaris independen cenderung tidak memiliki afiliasi langsung dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali, sehingga mereka lebih objektif dalam mendorong transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik. Temuan ini mendukung pandangan bahwa peran komisaris independen efektif dalam membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk strategi agresif dalam penghindaran pajak (Achmad et al., 2023). Di sisi lain, meskipun institusi

memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan, mereka mungkin tidak secara aktif terlibat dalam pengawasan atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi penghindaran pajak. Faktor-faktor seperti fokus pada keuntungan jangka pendek, kurangnya pemahaman mendalam tentang strategi perpajakan perusahaan, atau kepercayaan penuh kepada manajemen dapat menjadi penyebabnya (Aulia & Irawan, 2025).

Dalam perspektif teori agensi, temuan yang menunjukkan proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap ETR mengindikasikan bentuk mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Teori agensi menyatakan bahwa manajer memiliki insentif untuk bertindak demi kepentingan pribadi, termasuk melakukan praktik penghindaran pajak, yang dapat berdampak negatif terhadap kepentingan jangka panjang pemilik perusahaan dan reputasi korporasi. Kehadiran komisaris independen berfungsi sebagai pengawas eksternal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen, sehingga mampu memberikan pengawasan yang lebih objektif dan efektif terhadap keputusan manajerial. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka semakin kuat kontrol terhadap perilaku oportunistik agen, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Sementara itu, kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa investor institusional sebagai *principal* cenderung lebih berhati-hati terhadap praktik penghindaran pajak karena mempertimbangkan risiko jangka panjang dan reputasi, namun pengaruh pengawasan mereka belum cukup kuat untuk secara signifikan membatasi perilaku oportunistik manajemen. Kondisi

ini mencerminkan bahwa mekanisme *corporate governance* masih belum optimal dalam menyelaraskan kepentingan antara *principal* dan *agent*, di mana fungsi pengawasan komisaris independen justru dapat mendorong praktik penghindaran pajak, sementara kontrol dari investor institusional belum efektif dalam mengurangi konflik keagenan terkait strategi pajak perusahaan.

Keterkaitan dengan penelitian terdahulu juga memperkuat temuan ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Indira Yuni & Setiawan, 2019) menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rohyana & Maryana, 2021) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin rendah kemungkinan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2024) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional diharapkan dapat mengawasi perilaku manajemen agar bertindak secara efektif dan berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis perusahaan, termasuk keputusan terkait kebijakan perpajakan. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Irawan, 2025) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional diharapkan dapat mengawasi perilaku manajemen agar bertindak secara efektif dan berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis perusahaan, termasuk keputusan terkait kebijakan perpajakan. Investor institusional dengan keahlian dan sumber daya yang dimilikinya seharusnya mampu melakukan monitoring yang efektif terhadap

tindakan manajemen yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham termasuk praktik penghindaran pajak yang berisiko tinggi.

4.3.3 Pengaruh Transaksi Afiliasi terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi afiliasi memiliki koefisien sebesar 1,101 dengan nilai signifikansi 0,098 ($> 0,05$), yang menunjukkan bahwa transaksi afiliasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Meskipun demikian, nilai signifikansi 0,098 mendekati batas signifikansi konvensional, yang mengindikasikan bahwa adanya kecenderungan pengaruh yang cukup kuat. Nilai koefisien positif sebesar 1,101 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan transaksi afiliasi cenderung menurunkan praktik penghindaran pajak.

Transaksi afiliasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dapat disebabkan oleh regulasi yang mengharuskan wajib pajak untuk memberikan harga atau nilai dalam batas yang wajar, sehingga celah untuk menekan harga dalam transaksi perusahaan afiliasi semakin sempit (Fananta & Mulya, 2023). Meskipun terdapat kecenderungan bahwa transaksi afiliasi dapat digunakan untuk tujuan penghindaran pajak, pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan. Perusahaan dan otoritas pajak perlu tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan transaksi afiliasi untuk tujuan penghindaran pajak, serta memastikan bahwa regulasi yang ada diterapkan secara efektif untuk mencegah praktik tersebut (Br Sembiring et al., 2024).

Dalam perspektif teori agensi, temuan bahwa transaksi afiliasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun menunjukkan nilai signifikansi yang mendekati batas konvensional (0,098) mengindikasikan adanya potensi

perilaku oportunistik manajemen yang belum sepenuhnya terkontrol oleh mekanisme pengawasan. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa manajemen sebagai *agent* memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan transaksi afiliasi sebagai instrumen untuk melakukan penghindaran pajak, yang dapat menguntungkan perusahaan melalui penghematan beban pajak namun berpotensi merugikan *principal* dalam jangka panjang akibat risiko regulasi dan reputasi. Hasil yang tidak signifikan namun mendekati batas signifikansi dapat mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dari *principal* dan mekanisme *corporate governance* masih belum optimal dalam mendeteksi dan membatasi penggunaan transaksi afiliasi untuk tujuan penghindaran pajak, sehingga manajemen masih memiliki ruang untuk melakukan praktik tersebut meskipun tidak secara ekstensif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha & Rachmat, 2024) menjelaskan bahwa meskipun banyak perusahaan multinasional yang memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi untuk tujuan penghematan pajak, praktik tersebut tidak secara signifikan memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Br Sembiring et al., 2024) menghasilkan temuan bahwa praktik transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

4.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Hubungan Antara Profitabilitas dan Penghindaran Pajak

Hasil analisis interaksi antara ukuran perusahaan dan profitabilitas menunjukkan koefisien sebesar $-5,603E-5$ dengan nilai signifikansi $0,009 (< 0,05)$, yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dalam memoderasi

hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Nilai koefisien negatif yang sangat kecil (-0,00005603) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperlemah hubungan positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak. *Standardized coefficient* beta sebesar 12,167 mengindikasikan bahwa efek moderasi ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam model. Hal ini berarti bahwa pada perusahaan yang lebih besar, hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak menjadi lebih lemah, di mana peningkatan profitabilitas tidak serta merta diikuti dengan peningkatan praktik penghindaran pajak yang signifikan.

Perusahaan besar dengan profitabilitas tinggi mungkin lebih enggan melakukan penghindaran pajak karena mereka lebih terekspos kepada pengawasan publik dan pemerintah, serta memiliki kepentingan dalam menjaga reputasi jangka panjang. Hal ini juga menjelaskan mengapa pada penelitian ini hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak tidak menunjukkan signifikansi secara statistik (Safiinattunnajah & Setiyawati, 2022). Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki pengawasan yang lebih ketat dan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap peraturan perpajakan, sehingga mengurangi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak meskipun memiliki profitabilitas yang tinggi.

Dalam perspektif teori agensi, temuan bahwa ukuran perusahaan memperlemah hubungan antara profitabilitas dan penghindaran mengindikasikan bahwa perusahaan besar memiliki mekanisme pengawasan dan tata kelola yang lebih ketat dibandingkan perusahaan kecil. Pada perusahaan besar, *principal* (pemegang saham) umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan sumber daya untuk melakukan pengawasan terhadap *agent* (manajemen),

sehingga membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam memanfaatkan profitabilitas tinggi untuk melakukan penghindaran pajak agresif. Efek moderasi yang signifikan menunjukkan bahwa kompleksitas organisasi dan tingkat *scrutiny* yang lebih tinggi pada perusahaan besar, baik dari regulator, auditor eksternal, maupun *stakeholder* lainnya, membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait strategi pajak meskipun profitabilitas perusahaan tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa pada perusahaan besar, konflik keagenan dapat lebih efektif diminimalkan melalui sistem pengawasan yang lebih komprehensif, sehingga manajemen cenderung mengutamakan kepatuhan dan menghindari risiko reputasi jangka panjang daripada memaksimalkan penghematan pajak jangka pendek, berbeda dengan perusahaan kecil yang mungkin memiliki fleksibilitas lebih besar dalam praktik penghindaran pajak ketika profitabilitas meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Br Sembiring et al., 2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustadana, 2025) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhasil memoderasi hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung menghadapi regulasi pajak yang lebih ketat dan pengawasan pemerintah yang lebih intensif, sehingga mengurangi insentif penghindaran pajak dan melemahkan hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak.

4.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Hubungan Antara *Corporate Governance* dan Penghindaran Pajak

Analisis efek moderasi ukuran perusahaan terhadap hubungan *corporate governance* dan penghindaran pajak menunjukkan hasil yang berbeda untuk dua komponen *corporate governance* yang diuji. Pertama, interaksi ukuran perusahaan dengan proporsi komisaris independen memiliki koefisien sebesar $-2,696E-7$ dengan nilai signifikansi $0,026 (< 0,05)$, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara proporsi komisaris independen dan penghindaran pajak. Nilai koefisien positif mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan memperkuat efek positif proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Kedua, interaksi ukuran perusahaan dengan kepemilikan institusional memiliki koefisien sebesar $1,467E-7$ dengan nilai signifikansi $0,037 (< 0,05)$, yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Nilai koefisien positif yang sangat kecil mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan sedikit memperkuat hubungan negatif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Pada dasarnya komisaris independen diharapkan berperan sebagai pengawas objektif dalam struktur tata kelola perusahaan, termasuk mengawasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Namun dalam praktiknya, keberadaan komisaris independen justru dapat membuka ruang bagi manajemen untuk menjalankan strategi penghindaran pajak secara lebih canggih, terutama dalam perusahaan besar. Perusahaan besar biasanya memiliki struktur yang lebih

kompleks dan akses ke konsultan pajak serta teknologi informasi yang memadai. Ketika perusahaan besar memiliki lebih banyak komisaris independen, bukan tidak mungkin mereka digunakan sebagai pelindung legitimasi keputusan manajerial, termasuk keputusan agresif terkait perpajakan (Nazara et al., 2023). Ini memperkuat pandangan bahwa dalam konteks tertentu, komisaris independen tidak selalu efektif dalam menekan penghindaran pajak, justru dapat memperkuatnya melalui persetujuan diam-diam terhadap strategi manajerial.

Semakin besar perusahaan, maka semakin kuat peran investor institusional dalam menekan praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan peran institusi keuangan seperti dana pensiun, reksa dana, atau asuransi, yang umumnya memiliki orientasi investasi jangka panjang dan lebih aktif dalam pengawasan (Saragih et al., 2021). Dalam perusahaan besar, institusi semacam ini biasanya memiliki pengaruh yang lebih kuat, sehingga manajemen cenderung berhati-hati dalam mengambil kebijakan pajak yang agresif karena tekanan dari pemegang saham institusional.

Dalam perspektif teori agensi, temuan bahwa ukuran perusahaan memperkuat efek positif proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak mengindikasikan adanya kompleksitas dalam fungsi pengawasan pada perusahaan besar. Pada perusahaan yang lebih besar, komisaris independen mungkin menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam memahami seluruh operasi perusahaan, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pencapaian kinerja keuangan jangka pendek termasuk melalui strategi penghindaran pajak yang dianggap dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Sebaliknya, efek moderasi ukuran perusahaan yang memperkuat hubungan negatif kepemilikan

institusional terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa pada perusahaan besar, investor institusional memiliki kapasitas dan sumber daya yang lebih besar untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Kondisi ini mencerminkan bahwa pada perusahaan besar, investor institusional sebagai *principal* dapat lebih efektif dalam mengurangi konflik keagenan dan membatasi perilaku oportunistik manajemen terkait praktik penghindaran pajak karena mereka memiliki akses informasi yang lebih baik, *bargaining power* yang lebih kuat, dan kekhawatiran yang lebih besar terhadap risiko reputasi jangka panjang, sehingga pengawasan mereka menjadi lebih ketat dan efektif dalam mengarahkan manajemen untuk menghindari praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nabila & Kartika, 2023) menemukan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2024) menemukan bahwa perusahaan berskala besar cenderung memiliki kapasitas yang cukup untuk merancang strategi pajak secara optimal dan mengimplementasikan praktik akuntansi yang efisien guna menurunkan tingkat pajak efektif (*Effective Tax Rate*). Selain itu, penelitian oleh (Yunianto et al., 2023) menemukan bahwa ukuran perusahaan terbukti mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Kapasitas dan kompleksitas operasional perusahaan besar dapat mengurangi efektivitas peran pengawasan kepemilikan institusional.

4.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Hubungan Antara Transaksi Afiliasi dan Penghindaran Pajak

Hasil analisis interaksi ukuran perusahaan dengan transaksi afiliasi menunjukkan koefisien sebesar $-1,584E-8$ dengan nilai signifikansi $0,845 (> 0,05)$, yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara transaksi afiliasi dan penghindaran pajak. Nilai koefisien negatif yang sangat kecil ($-0,00000001584$) menunjukkan arah hubungan negatif, artinya ukuran perusahaan cenderung sedikit memperlemah hubungan positif antara transaksi afiliasi dan penghindaran pajak, namun pengaruh moderasi ini tidak signifikan secara statistik.

Secara teoritis perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih ketat, baik dari internal manajemen maupun pemangku kepentingan eksternal. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, diharapkan bahwa perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam menggunakan skema transaksi afiliasi untuk tujuan penghindaran pajak. Namun hasil temuan ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang bisa berarti bahwa ukuran perusahaan bukanlah faktor penentu utama dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara transaksi afiliasi dan penghindaran pajak. Kendati perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya dan kompleksitas struktur bisnis, hal tersebut tidak otomatis memengaruhi sejauh mana transaksi afiliasi berdampak terhadap penghindaran pajak (Br Sembiring et al., 2024).

Dalam perspektif teori agensi, temuan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara transaksi afiliasi dan penghindaran pajak mengindikasikan bahwa kompleksitas pengawasan terhadap transaksi dengan pihak berelasi relatif konsisten baik pada perusahaan besar maupun kecil. Meskipun arah koefisien negatif menunjukkan kecenderungan perusahaan besar memiliki kontrol yang sedikit lebih baik, pengaruh yang tidak signifikan mencerminkan bahwa transaksi afiliasi memiliki karakteristik khusus berupa informasi asimetri tinggi yang sulit dideteksi oleh *principal* terlepas dari ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen sebagai *agent* memiliki keunggulan informasi yang signifikan dalam memahami detail transaksi afiliasi, sehingga konflik keagenan terkait pemanfaatan transaksi afiliasi untuk penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh skala operasi perusahaan dan memerlukan mekanisme pengawasan khusus yang lebih fokus pada transparansi transaksi dengan pihak berelasi.

Dalam perspektif teori agensi, transaksi afiliasi sering dikaitkan dengan peluang bagi manajer (agen) untuk bertindak oportunistik, termasuk memindahkan laba antar entitas dalam grup perusahaan guna menghindari pajak, terutama ketika pengawasan dari pemilik (prinsipal) terbatas. Namun ketidaksignifikanan moderasi ukuran perusahaan terhadap hubungan ini menunjukkan bahwa peran ukuran perusahaan tidak secara langsung memengaruhi efektivitas kontrol atas transaksi tersebut. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa mekanisme pengawasan terhadap transaksi afiliasi lebih bergantung pada kualitas tata kelola, sistem audit internal, dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, bukan semata pada skala

perusahaan. Baik perusahaan besar maupun kecil dapat sama-sama memiliki kelemahan atau kekuatan dalam sistem pengawasan internalnya. Oleh karena itu, dalam konteks teori agensi hasil ini mencerminkan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu menjadi faktor penentu dalam memperbesar atau memperkecil konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, khususnya dalam hal pengelolaan transaksi afiliasi. Mekanisme kontrol yang efektif tetap menjadi kunci utama untuk mengendalikan potensi penyimpangan, terlepas dari besar kecilnya entitas perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha & Rachmat, 2024) menjelaskan bahwa salah satu alasan ukuran perusahaan tidak mampu memengaruhi transaksi afiliasi terhadap penghindaran pajak adalah adanya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak. DJP melakukan pengawasan transaksi afiliasi antar perusahaan dengan ketat. Salah satunya adalah kewajiban perusahaan membuat dan melaporkan dokumen *transfer pricing* yang digunakan untuk memastikan transaksi antar perusahaan induk dan anak perusahaan berjalan sesuai aturan bisnis yang wajar. Selain itu, penelitian oleh (Br Sembiring et al., 2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara transaksi afiliasi dengan penghindaran pajak.